

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 60 Sanggau (78512)
Telepon (0564) 2026001 Faximile (0564) 2026001
E-mail: kesbangpol@mail.sanggau.go.id Website: kesbangpol.sanggau.go.id



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga laporan kinerja tahun 2024 ini dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan laporan tahun ke 5 (laporan terakhir) sesuai Dokumen Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Disamping itu sebagai wujud prinsip "akuntabilitas" pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dan prinsip "*good governance*" dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap apa yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau selama tahun 2024, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Baik sumber daya keuangan, sarana prasarana, waktu dan sumber daya manusia.

Besar harapan kami, kinerja yang disajikan dalam laporan ini dapat menjadi masukan yang berharga dan bermanfaat bagi seluruh unit kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau guna meningkatkan kinerja yang terus lebih baik dimasa yang akan datang. Demikian juga bagi *stakeholders*, diharapkan adanya umpan balik yang konstruktif guna mendukung terwujudnya visi ke depan "Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan".

Sanggau, 24 Maret 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Antonius, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196511261986031013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Berdasarkan periode waktu dokumen renstra, maka laporan kinerja merupakan laporan kinerja tahun kelima atau tahun terakhir dalam upaya mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan. Laporan ini lebih menekankan pada analisis di tataran hasil (*outcome*) dari pada keluaran (*output*). Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai, dapat lebih terukur hasil dan juga kemanfaatannya, tidak hanya sekedar keluaran kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja utama dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan, secara umum menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 dengan kategori “Sangat Tinggi”. Rata-rata capaian dari ketiga indikator tersebut sebesar 99,95%.

Walaupun capaian kinerja tahun 2024, termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, namun tidak serta merta hal ini menjadi faktor berhentinya upaya berinovasi dan upaya peningkatan kompetensi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan dimasa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau bisa menjadi salah satu perangkat daerah yang berkinerja tinggi dan menjadi agen perubahan dalam berkinerja di Kabupaten Sanggau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
Bab 1 PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
4. Sumber Daya Aparatur	2
5. Sumber Daya Keuangan	3
6. Sarana dan Prasarana	4
B. PERMASALAHAN UTAMA	4
Bab 2 PERENCANAAN KINERJA	6
A. PERENCANAAN STRATEGIS	6
a. Tujuan	6
b. Sasaran	7
B. PERJANJIAN KINERJA	7
Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA	8
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	9
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol	9
2. Meningkatnya penanganan konflik sosial	11
3. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	20
C. REALISASI ANGGARAN	28
Bab 4 PENUTUP	29
Lampiran-lampiran	
 Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2024	30-31

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan amanat dari reformasi birokrasi. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menganut salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan pemberi amanah kepada penerima amanah.

Akuntabilitas pada suatu instansi pemerintah atau perangkat daerah telah diatur dalam Keputusan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Presiden tersebut mengamanatkan akuntabilitas berorientasi kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusun Laporan Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Sanggau, sebagai implementasi dalam berakuntabilitas guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

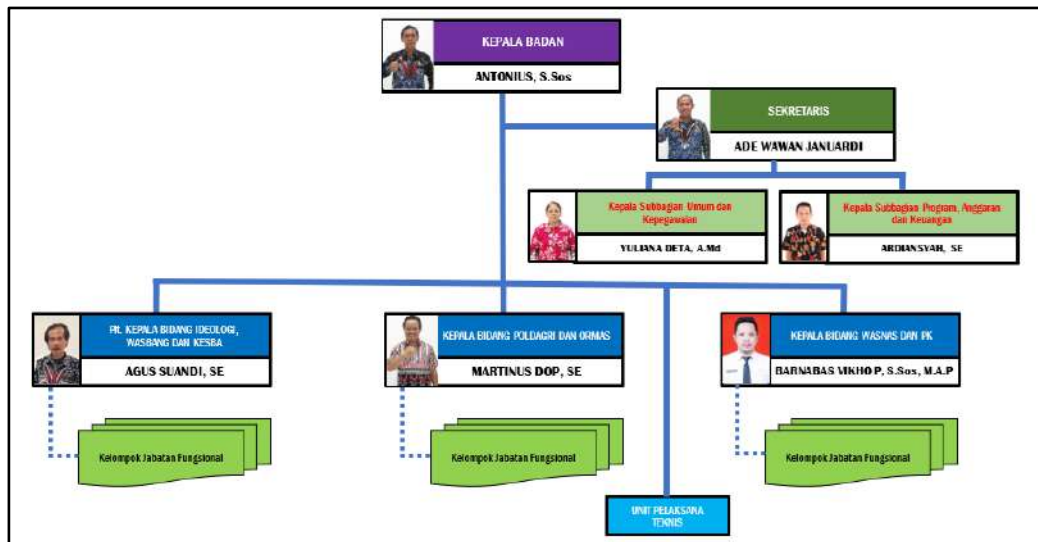
2. Susunan Organisasi

Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, bahwa susunan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau terdiri atas :

- 1) Kepala badan;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 6) UPT; dan
- 7) Kelompok jabatan fungsional.

Secara rinci, bagan susunan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau posisi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SANGGAU



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau merupakan perangkat daerah dengan tipe B. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur

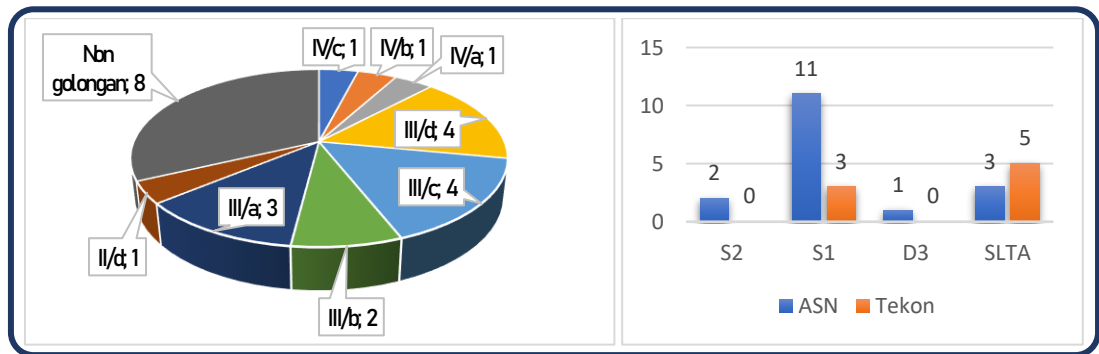
Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau didukung sebanyak 25 orang, terdiri dari 14 orang PNS, 3 orang PPK, dan 8 orang tenaga kontrak (per 31 Desember 2024).



Jumlah sumber daya aparatur tersebut, jika digolongkan berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan, jabatan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada grafik berikut.

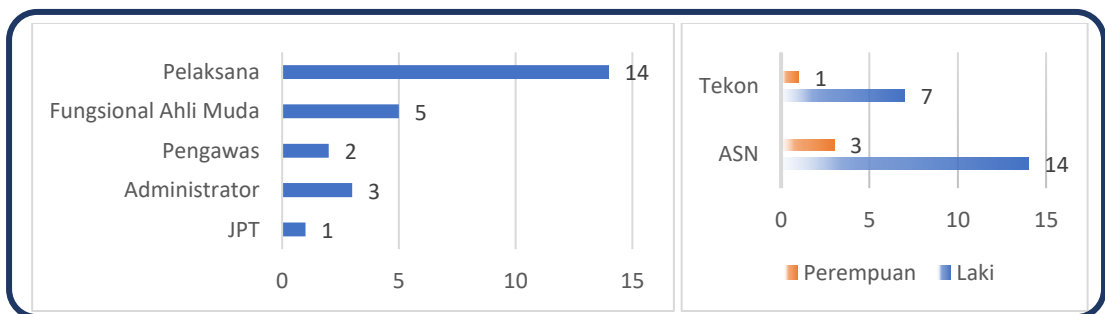
Grafik 1.1

SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN TINGKAT PENDIDIKAN



Grafik 1.2

SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

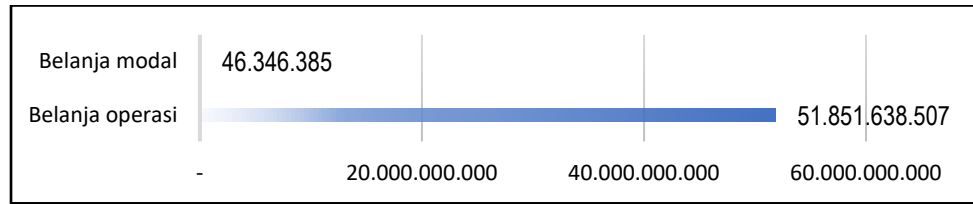


5. Sumber Daya Keuangan

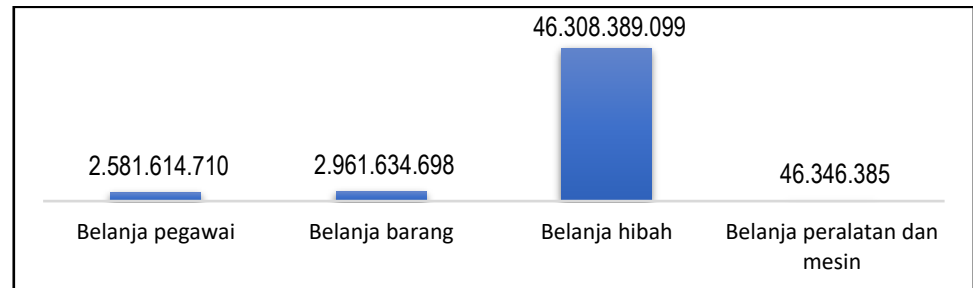
Dukungan sumber daya keuangan (anggaran) untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai APBD perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp51.897.984.892.00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung belanja pada 6 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Secara umum anggaran tersebut untuk belanja sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.3 dan 1.4

Grafik 1.3

BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

**Grafik 1.3**

BERDASARKAN JENIS BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL



6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi tahun 2024, secara umum sebagai berikut :

No	Jenis Sarpras	Banyaknya
1	Tanah dan bangunan	1 usnit
2	Kendaraan bermotor roda empat	1 unit
3	Kendaraan bermotor roda dua	8 unit
4	Mesin absensi	1 unit
5	Lemari besi	2 unit
6	Filling cabinet besi	6 unit
7	Brandkas	1 unit
8	Lemari kaca	2 unit
9	Tempat tidur kayu	1 unit
10	Meja ½ biro	8 unit
11	Kursi rapat	20 unit
12	Kursi tamu	3 unit
13	Kursi putar	15 unit
14	Mesin pemotong rumput	1 unit
15	Alat pendingin ruangan	11 unit
16	Kompas gas	1 unit
17	Rak piring	1 unit

No	Jenis Sarpras	Banyaknya
18	Televisi	1 unit
19	Sound system	2 unit
20	Wireless	1 unit
21	Camera film	2 unit
22	Alat rumah tangga lainnya	2 unit
23	Meja kerja pejabat eselon II	1 unit
24	Meja kerja pejabat eselon III	4 unit
25	Meja kerja pejabat eselon IV	11 unit
26	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit
27	Kursi kerja pejabat eselon III	3 unit
28	Lemari untuk arsip dinamis	2 unit
29	Infocus/ proyektor	1 unit
30	Facsimile	1 unit
31	Tablet	2 unit
32	Komputer (laptop dan PC)	24 unit
33	Printer	15 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA

Situasi yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan tata kelola pemerintahan yang baik. Situasi tersebut setiap waktu dapat berubah, sangat dipengaruhi situasi nasional, regional maupun internasional, baik dari aspek keamanan, sosial, politik, ekonomi, maupun kesehatan, seperti pandemi covid-19. Jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak

pada terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, yang diamanatkan untuk membangun kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sanggau berjalan dan berkembang dengan baik.

Untuk mewujudkan kesatuan bangsa dan politik yang berjalan dan berkembang dengan baik, dijumpai beberapa permasalahan, baik bersifat internal maupun eksternal. Secara umum permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:

1. Kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan masih belum optimal;
2. Jumlah personil dalam organisasi kelembagaan kesatuan bangsa dan politik masih belum cukup dan ideal.
3. Berita bohong (hoaks), ujaran kebencian dan kampanye hitam dalam rangka Pemilu dan Pilkada masih banyak beredar dimasyarakat melalui media sosial;
4. Masih rendahnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam menyikapi situasi, kondisi dan potensi konflik di daerah;
5. Peredaran narkoba di daerah masih terus mengancam generasi bangsa di daerah;
6. Pendidikan politik di masyarakat belum optimal; dan
7. Belum optimalnya peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung visi “Sanggau Maju dan Terdepan”, yang dijabarkan dalam misi ke-4 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dan misi ke-5 yaitu “Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis” telah disusun perencanaan strategis (Renstra) dalam dokumen Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, yang telah disempurnakan berdasarkan hasil *coaching klinik* SAKIP dari Kementerian PAN dan RB. Renstra tersebut sebagai landasan dan acuan bagi unit kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, dalam perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja setiap tahunnya. Secara umum penjabaran renstra dapat digambarkan dalam cascading sebagaimana dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1

CASCADING BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SANGGAU



a. Tujuan

Tujuan yang hendak diwujudkan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dalam mendukung visi “Sanggau Maju dan Terdepan” sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator kinerja utama yaitu nilai SAKIP; dan
- 2) Peningkatan kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya, dengan indikator kinerja utama angka konflik SARA.

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dalam rangka mewujudkan 2 tujuan di atas sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol, dengan indikator kinerja utama yaitu nilai AKIP Badan Kesbangpol;
- 2) Meningkatnya penanganan konflik sosial, dengan indikator kinerja utama yaitu persentase konflik yang terselesaikan; dan
- 3) Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan, dengan indikator kinerja utama yaitu persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang aktif;

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau, pada tanggal 3 Januari 2024 telah disusun dan disepakati perjanjian kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2024 yang isinya sebagaimana dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	63
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%
3	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	Persentase ormas dan orpol yang aktif	94%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp2.839.320.208
2	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Rp1.240.474.407
3	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp44.823.690.075
4	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp1.999.673.917
5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp370.238.084
6	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp210.938.784
	Total	Rp51.484.335.475

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan/sub kegiatan dan sumber daya organisasi, adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karenanya, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan/sub kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban atas program/kegiatan/sub kegiatan instansi pemerintah, maka dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauhmana capaian kinerja indikator dari masing-masing sasaran strategis. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	63	62,95	99,92%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yg terselesaikan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	Persentase ormas dan orpol yang aktif	94%	93,94%	99,94%
Rata-rata					99,95%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja dari 3 indikator kinerja utama yaitu sebesar 99,95%. Capaian kinerja tertinggi terdapat pada sasaran strategis kedua sebesar 100%, disusul sasaran strategis ketiga sebesar 99,92%, dan sasaran strategis kesatu sebesar 99,94%.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol

Sasaran strategis ini dalam rangka mendukung misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Indikator kinerja utamanya adalah nilai AKIP Badan Kesbangpol. Pengukurannya dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Sanggau dan penilaiannya yaitu total nilai komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a) Capaian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian tim Inspektorat Kabupaten Sanggau tahun 2024, diperoleh hasil evaluasi implementasi AKIP Kesbangpol (realisasi) sebagaimana dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PERTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	63	62,95	99,92%

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, ditargetkan nilai AKIP Badan Kesbangpol sebesar 63, dengan predikat B atau interpretasi Baik. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh nilai sebesar 62,95, dengan predikat B atau interpretasi Baik. Nilai ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Untuk mendukung tercapainya target tersebut, sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

ANGGARAN UNTUK SASARAN STRATEGIS PERTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya AKIP Badan Kesbangpol	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	3.015.343.595	2.559.607.227	84,89%	99,92%	84,88%

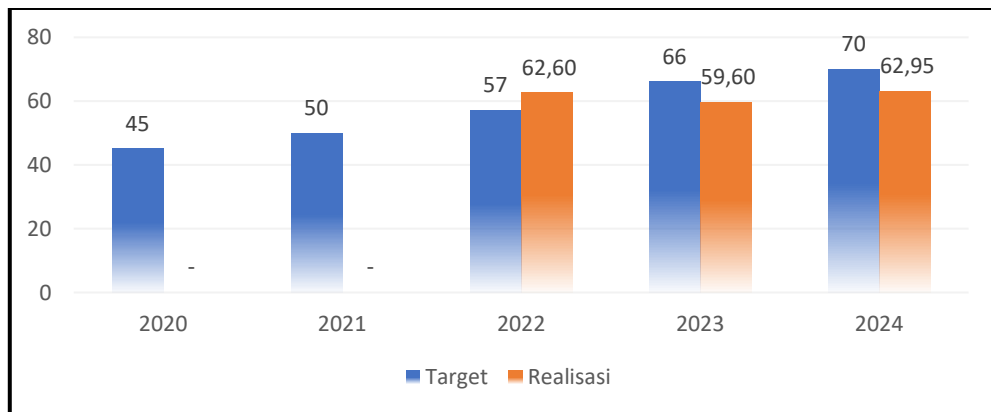
Sesuai tabel 3.3 di atas, anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 84,88%, dengan capaian kinerja sebesar 99,92%. Dari aspek efisiensinya, yang menggambarkan rasio antara realisasi belanja langsung dengan anggaran belanja, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 84,88%, dengan kategori “Cukup Efisien” (rasionya 80%-90%), namun cukup efektif.

b) Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

Sesuai renstra perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, dalam rangka mendukung kinerja kepala daerah sesuai RPJMD perubahan 2019-2024, ditargetkan nilai AKIP Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau di tahun 2024 sebesar 71. Pada tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 62,60, selanjutnya menurun di tahun 2023 menjadi 59,60 dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 62,95. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1

NILAI AKIP 2020 - 2024

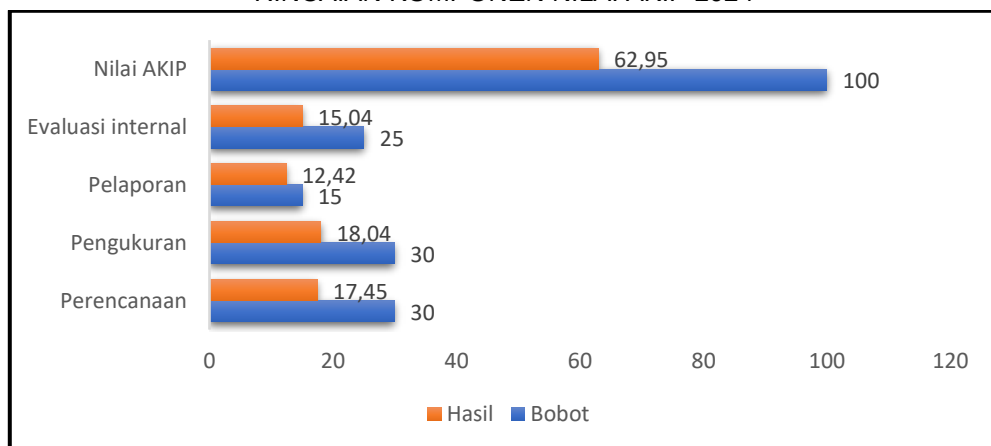


c) Analisis capaian kinerja.

Berdasarkan penilaian terhadap 4 komponen dalam penilaian AKIP, terdapat 1 komponen yaitu pelaporan dinilai sangat baik, dengan realisasi 73% dari nilai bobot, sedangkan komponen perencanaan, pengukuran dan evaluasi internal, dinilai cukup (memadai), dengan nilai kurang dari 60% dari nilai bobot. Secara rinci, hasil penilaian dari masing-masing komponen sebagaimana tergambar dalam grafik 3.2

Grafik 3.2

RINCAIAN KOMPONEN NILAI AKIP 2024



Ketepatan waktu dan transparansi dalam pelaporan kinerja, merupakan salah satu komitmen pimpinan di lingkup Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, juga menjadi bagian terpenting dari sistem AKIP Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2024. Dimana setiap aktivitas dari unit kerja, wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol sebagaimana dijelaskan di atas, dinilai sudah baik dan optimal. Namun dilihat dari beberapa komponen penilaian, terdapat beberapa aspek yang masih rendah, sehingga nilai yang diperoleh belum optimal. Hal tersebut perlu diperbaiki dimasa yang akan datang. Adapun permasalahan dan solusi ke depan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Dokumen perencanaan (renstra, renja dan perjanjian kinerja) belum dipublikasikan secara umum, baik secara offline maupun online (melalui website);
2. Dokumen renstra belum sepenuhnya menjadi acuan penyusunan RKA;
3. Rencana aksi atas kinerja belum tersusun baik dengan mencantumkan target secara periode dan komponen rincian kegiatannya dalam mendukung pencapaian kinerja, serta belum dimonitor secara optimal;
4. Pemantauan rencana aksi dan evaluasi kinerja, belum dilaksanakan dengan baik secara berkala; dan
5. Sumberdaya organisasi, baik aspek sumber daya manusia maupun aspek anggaran untuk peningkatan kapasitas personil sehingga mampu melaksanakan tugas secara baik, minim dan belum ideal.

b. Solusi

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan secara berkala sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik, melalui media cetak (memperbanyak dokumen dalam bentuk buku) maupun melalui media online (website) yang diberikan tanggung jawabnya kepada 1 orang pegawai yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi maupun dibidang *publik relation*;
2. Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan rincian komponen kegiatan beserta indikator kinerja yang terukur dan kelompok sasaran yang jelas yang dilakukan setiap awal tahun;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi secara berkala;
4. Menganalisis secara baik kebutuhan jumlah ASN dan mengajukan formasi ke BKPSDM Kabupaten Sanggau; dan
5. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kompetensi ASN.

2. Meningkatkan penanganan konflik sosial

Sasaran strategis ini dalam rangka mendukung misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu “Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis”. Indikator kinerja utamanya adalah persentase konflik sosial yang terselesaikan. Pengukurannya dilakukan secara mandiri oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, dengan formulasi jumlah konflik SARA (suku, agama, ras dan

antar golongan) yang diselesaikan dibagi jumlah konflik SARA yang terjadi pada tahun berkenaan, dikali 100%.

a) Capaian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh realisasi kinerja sebagaimana dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KEDUA

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%	100%

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, persentase konflik sosial yang terjadi di daerah ditargetkan terselesaikan 100%. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, secara umum situasi di daerah tahun 2024 di momen pesta demokrasi (Pemilu dan Pilkada serentak) dinilai aman serta kondusif dan tidak terjadi adanya konflik SARA di daerah. Konflik SARA merupakan konflik yang terjadi atas berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 5 kali konflik sosial dan kesemuanya dapat ditangani dengan baik sehingga tidak memunculkan potensi konflik SARA. Konflik sosial tersebut terkait agama 1 konflik, perkebunan 3 konflik, pertambangan 1 konflik, dan perbatasan 1 konflik.

Untuk mendukung tercapainya target tersebut, sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

ANGGARAN UNTUK SASARAN STRATEGIS KEDUA

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)			CAPAIAN TINGKAT KINERJA EFISIENSI	
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.290.466.007	1.235.384.775	95,73	100%	95,63%
		Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	210.938.784	203.808.610	96,62		
		Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	338.388.084	320.242.834	94,64		
	Jumlah		1.839.792.875	1.759.436.219	95,63		

Sesuai tabel 3.5 di atas, terdapat sebanyak 3 program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya penanganan konflik sosial”. Secara keseluruhan anggaran terealisasi sebesar 95,63%, dengan capaian kinerja sebesar

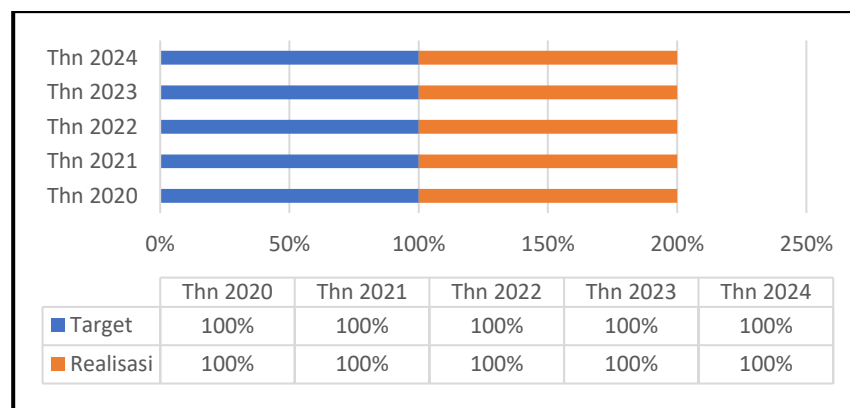
100,00%. Dari aspek efisiensinya, yang menggambarkan rasio antara realisasi belanja dengan alokasi belanja, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100,00%, dengan kategori “Kurang Efisien” (rasionya 90%-100%), namun sangat efektif.

b) Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

Sesuai renstra perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, dalam rangka mendukung kinerja kepala daerah sesuai RPJMD perubahan 2019-2024, ditargetkan setiap tahunnya penanganan konflik sosial terselesaikan 100%. Mulai dari awal tahun renstra (2020) sampai tahun 2024, terealisasi semuanya 100%, dengan tidak meninggalkan potensi konflik SARA lanjutan. Secara rinci realisasi kinerja penanganan konflik sosial dapat dilihat pada grafik 3.4.

Grafik 3.4

REALISASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2020 – 2024



c) Analisis capaian kinerja.

Secara umum, konflik SARA di masyarakat terjadi karena : pemahaman sempit para penganut paham (masyarakat) yang menganggap paham yang dianut paling benar, kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah, mengedepankan paham radikalisme, kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi, dan perbedaan penafsiran terhadap isi kitab suci yang diyakini. Guna mencegah terjadinya konflik SARA di daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau menerapkan strategi :

1. Peningkatan penghayatan, pengamanan dan pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat;
2. Peningkatan kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); dan
3. Peningkatan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta pencegahan peningkatan penyalahgunaan narkoba di daerah.

Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, pada tahun 2024, dilaksanakan beberapa kegiatan, yang kesemuanya itu dalam rangka upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya konflik sosial yang dapat berkembang besar menjadi konflik SARA. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pencapaian kinerja persentase konflik sosial di daerah yang terselesaikan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya konflik sosial di daerah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan wadah untuk berkumpulnya warga masyarakat (perwakilan etnis yang ada) dalam rangka berbagi informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan di daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 91/BKBP/2022, tentang Pembentukan Forum dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sanggau Periode 2021-2024, bahwa forum tersebut memiliki masa bakti 3 tahun.

Oleh karena masa baktinya berakhir di bulan Februari 2024, maka dilaksanakan rapat pembentukan pengurus baru FPK periode 2024-2027, pada tanggal 12 Juli 2024. Sesuai hasil rapat, terpilih Hermes Dick, SH., M.Si., CPM, perwakilan etnis Dayak, sebagai ketua pengurus dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 272/BKBP/2024, tanggal 30 Agustus 2024, tentang Pembentukan Pengurus dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sanggau Periode 2024-2027.

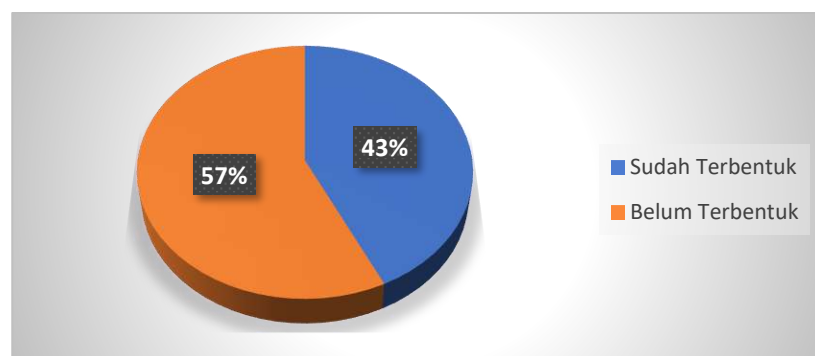


Forum ini bertugas : menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan; menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan. Dalam melaksanakan tugasnya, forum ini dibantu dengan FPK di tingkat kecamatan.

Untuk mendukung tugas FPK di tingkat kabupaten, juga dibentuk FPK di tingkat kecamatan. Sampai 31 Desember 2024, FPK ditingkat kecamatan yang sudah terbentuk dan masa baktinya masih aktif sebanyak 43%, atau 6 kecamatan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 3.5

REALISASI PEMBENTUKAN FPK DI TINGKAT KECAMATAN



Kecamatan-kecamatan yang sudah terbentuk FPK yaitu Kecamatan Toba, Kembayan, Sekayam, Beduai, Meliau dan Entikong. Sedangkan kecamatan yang belum terbentuk FPK yaitu Kecamatan Kapuas, Parindu, Mukok, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Noyan, Jangkang, Bonti dan Balai.

2. Melaksanakan Sosialisasi dan Mengaktifkan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah berkumpulnya perwakilan tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Sanggau. Dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 193/BKBP/2019, tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024, bahwa forum tersebut memiliki masa bakti 5 tahun.

Oleh karena masa baktinya berakhir di bulan Maret 2024, maka pada tanggal 5 Maret 2024 dilaksanakan rapat pembentukan pengurus baru FKUB periode 2024-2029. Sesuai hasil rapat, terpilih Pdt. Suyono Asun, M.Th, unsur perwakilan gereja Protestan, sebagai ketua pengurus dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 99/BKBP/2024, tanggal 6 Maret 2024, tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau Periode 2024-2029. Pengurus dikukuhkan oleh Bupati Sanggau pada tanggal 19 September 2024.



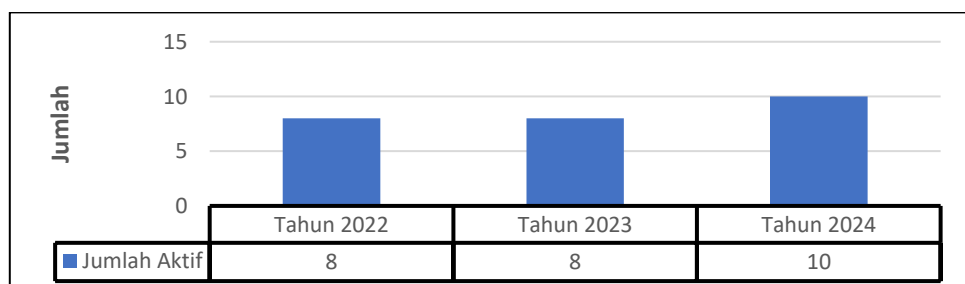
Guna mendukung program pemerintah dalam rangka moderasi dan penguatan kerukunan umat beragama di daerah, terlebih menyongsong tahun politik (Pemilu dan Pilkada serentak), diberikan dana hibah kepada FKUB sebesar Rp75.000.000,00. Dana tersebut dipergunakan FKUB untuk program/kegiatannya yang berdampak pada penguatan dan peningkatan toleransi umat beragama di Kabupaten Sanggau. Selain itu juga dalam rangka mendukung program Desa Sadar Kerukunan yang ditetapkan/dilaksanakan di Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam. Sampai akhir 2024, sudah terbentuk 2 desa/kelurahan "Sadar Kerukunan" disamping Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas pada tahun 2021.



Sampai akhir tahun 2024, FKUB tingkat kecamatan yang masih aktif atau sudah terbentuk kepengurusan baru dikarenakan masa baktinya habis sebanyak 10 kecamatan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.6.

Grafik 3.6

REALISASI FKUB YANG MASIH AKTIF ATAU SUDAH TERBENTUK
KEPENGURUSAN BARU DI TINGKAT KECAMATAN



Kecamatan-kecamatan yang FKUB masih aktif atau sudah dilakukan pemilihan pengurus baru yaitu Kecamatan Kapuas, Parindu, Tayan Hulu, Kembayan, Beduai, Bonti, Toba, Balai, Tayan Hilir dan Meliau. Sedangkan kecamatan yang FKUB nya sudah tidak aktif atau habis masa baktinya yaitu Mukok, Sekayam, Entikong, Noyan, dan Jangkang.

3. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Sosialisasi P4GN di daerah dilakukan dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau dan Kepolisian Resor Sanggau. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu implementasi dari Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika Tingkat Kabupaten Sanggau, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 231/BKBP/2021, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 265/BKBP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 231/BKBP/2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika Tingkat Kabupaten Sanggau.

Sosialisasi P4GN mengangkat tema “Mari Jauhi Narkotika Agar Masa Depan Generasi Penerus Bangsa Sejahtera”. Sasaran peserta sosialisasi yaitu para perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelajar SLTP dan SLTA di 3 wilayah yaitu :



No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Entikong	60 orang	25 Juli 20224
2	Tayan Hilir	60 orang	5 November 2024
3	Toba	60 orang	7 November 2024
	Jumlah	180 orang	

4. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat

Sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat di daerah dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di daerah menjelang Pemilu/Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024. Mengingat Pemilu/Pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024. Selain itu juga dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai arti pentingnya kewaspadaan dini di masyarakat, sehingga diharapkan



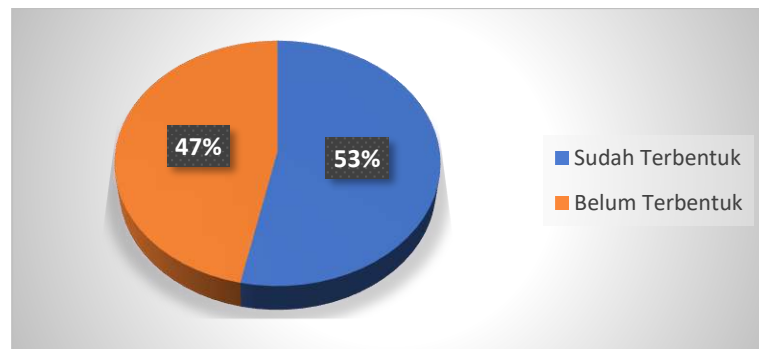
terbentuk wadah yang bernama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bagi kelompok masyarakat di kecamatan, guna menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Sosialisasi melibatkan pejabat dari Polres Sanggau serta stakeholders lainnya. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di 2 kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Sekayam	50 orang	16 Juli 2024
2	Balai	50 orang	18 Juli 2024
	Jumlah	100 orang	

Sampai akhir tahun 2024, jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kecamatan yang sudah terbentuk, masih sama dengan tahun 2023 (belum ada terbentuk yang baru) yaitu sebanyak 8 kecamatan atau 53% dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.7.

Grafik 3.7

REALISASI PEMBENTUKAN FKDM DI TINGKAT KECAMATAN



Kecamatan-kecamatan yang sudah membentuk FKDM yaitu Kecamatan Beduai, Kembayan, Entikong, Bonti, Tayan Hulu, Balai, Toba, dan Noyan. Sedangkan kecamatan yang belum terbentuk FKDM yaitu Kecamatan Kapuas, Mukok, Tayan Hilir, Sekayam, Jangkang, Meliau, dan Parindu.

Selain itu, juga dilaksanakan rapat koordinasi tim kewaspadaan dini dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kabupaten Sanggau, pada tanggal 26 November 2024, dengan peserta 74 orang. Rapat koordinasi ini untuk mengoptimalkan peran dan fungsi serta sinergitas seluruh elemen masyarakat dalam upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sanggau yang serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024



5. Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah serta Pembagian Bendera Merah Putih

Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme di masyarakat, Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau memfasilitasi penyelenggaraan hari besar nasional maupun hari besar daerah. Adapun hari besar yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2024;



- 2) Upacara peringatan Hari Berkabung Daerah, tanggal 28 Juni 2024;



- 3) Pembagian bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 2024;



- 4) Upacara renungan suci dan penaikan/penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 2024;



- 5) Penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama TNI dalam rangka TMMD di Dusun Selabe, Kecamatan Beduai; dan



6) Upacara peringatan Hari Bela Negara ke-74, tanggal 19 Desember 2024



Sesuai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis “Meningkatnya penanganan konflik sosial” sebagaimana di atas, dinilai sudah sangat baik. Namun dilihat dari beberapa variabel pendukung dalam rangka pencegahan terjadinya konflik sosial di daerah, masih belum optimal dan perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Adapun permasalahan dan solusi ke depan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Belum optimalnya pembentukan dan penguatan FPK di tingkat kecamatan.
2. Masih dijumpai adanya FKUB di tingkat kecamatan yang masa baktinya sudah lewat dan belum dilakukan musyawarah pembentukan kepengurusan baru.
3. Belum optimalnya pembentukan dan penguatan FKDM di tingkat kecamatan.

b. Solusi

1. Menyurati dan mendorong Camat untuk memfasilitasi pembentukan FPK dan musyawarah pembentukan pengurus baru FPK yang tidak aktif di tingkat kecamatan;
2. Menyurati dan mendorong Camat untuk mengingatkan dan memfasilitasi pengurus FKUB di tingkat kecamatan guna melakukan musyawarah pemilihan pengurus FKUB masa bakti yang baru.
3. Menyurati dan mendorong Camat untuk memfasilitasi pembentukan FKDM yang baru dan musyawarah pembentukan pengurus baru bagi FKDM yang masa baktinya telah lewat di tingkat kecamatan.
4. Membina dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional FPK, FKUB dan FKDM di tingkat kecamatan.

3. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan

Sasaran strategis ini dalam rangka mendukung misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu “Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis”. Indikator kinerja utamanya adalah persentase organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi politik (orpol) yang aktif. Pengukurannya dilakukan secara mandiri oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau dengan formulasi jumlah ormas dan partai politik yang terdaftar dan yang aktif, dibagi jumlah keseluruhan ormas dan partai politik yang terdaftar se-Kabupaten Sanggau, dikali 100%.

a) Capaian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh hasil (realisasi) sebagaimana dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	Persentase ormas dan orpol yang aktif	94%	93,94%	99,94%

Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2024, persentase ormas dan organisasi politik yang aktif ditargetkan menjadi 94%. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai sebesar 93,94%. Dari 148 ormas di tahun 2024 yang ada di Kabupaten Sanggau (bertambah 16 ormas dari tahun 2023), 137 ormas kategori aktif. Sedangkan organisasi politik (18 partai politik) yang ada, kesemuanya kategori aktif. Dengan demikian, capaian kinerja meningkatnya peran ormas dan organisasi politik dalam pembangunan tahun 2024 terealisasi sebesar 99,94%.

Untuk mendukung tercapainya target tersebut, sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7

ANGGARAN UNTUK SASARAN STRATEGIS KETIGA

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	Peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	45.043.174.505	44.798.463.288	99,46%	99,94%	98,53%
		Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.999.673.917	1.929.773.714	96,50%		
	Jumlah		47.042.848.422	46.728.237.002	99,33%		

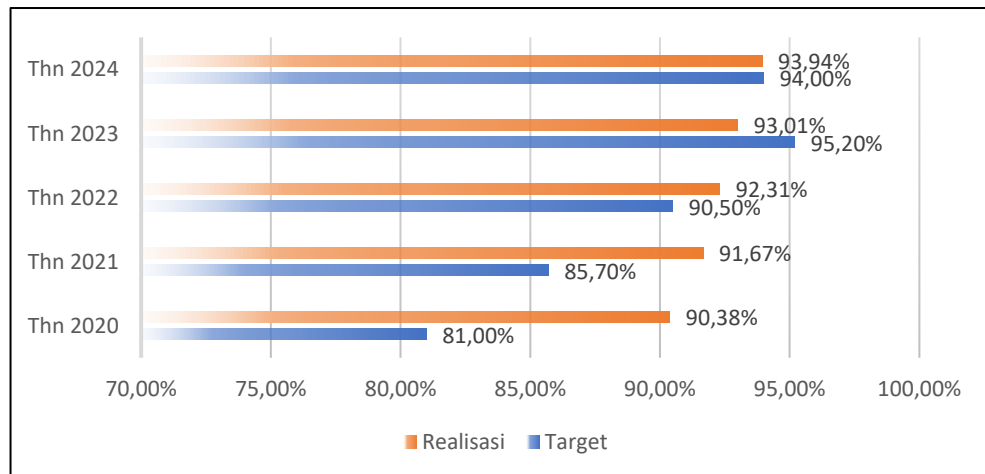
Sesuai tabel 3.7 di atas, terdapat 2 program yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan”. Secara keseluruhan anggaran terealisasi sebesar 99,33%, dengan capaian kinerja sebesar 99,94%. Dari aspek efisiensinya, yang menggambarkan rasio antara realisasi belanja langsung dengan realisasi belanja keseluruhan, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 98,53%, dengan kategori “Kurang Efisien” (rasionya 90%-100%), namun sangat efektif.

b) Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah.

Sesuai renstra perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, dalam rangka mendukung kinerja kepala daerah sesuai RPJMD perubahan 2019-2024, ditargetkan sampai tahun 2024, seluruh ormas dan organisasi politik aktif dalam pembangunan. Pada awal tahun renstra (2020), terealisasi 90,38% ormas dan organisasi politik aktif, selanjutnya meningkat menjadi 92,31% (tahun 2022), 93,01% (tahun 2023) dan 93,94% (tahun 2024). Secara rinci realisasi kinerja meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan dapat dilihat pada grafik 3.8.

Grafik 3.8

PERSENTASE ORMAS DAN ORPOL AKTIF



c) Analisis capaian kinerja.

Peran ormas dan organisasi politik dalam pembangunan sangatlah penting dalam rangka mendukung kualitas kehidupan sosial politik dan berbudaya di daerah. Oleh karenanya, tidak hanya jumlah yang besar, tetapi perlu juga perlu keaktifan ormas dan parpol tersebut.

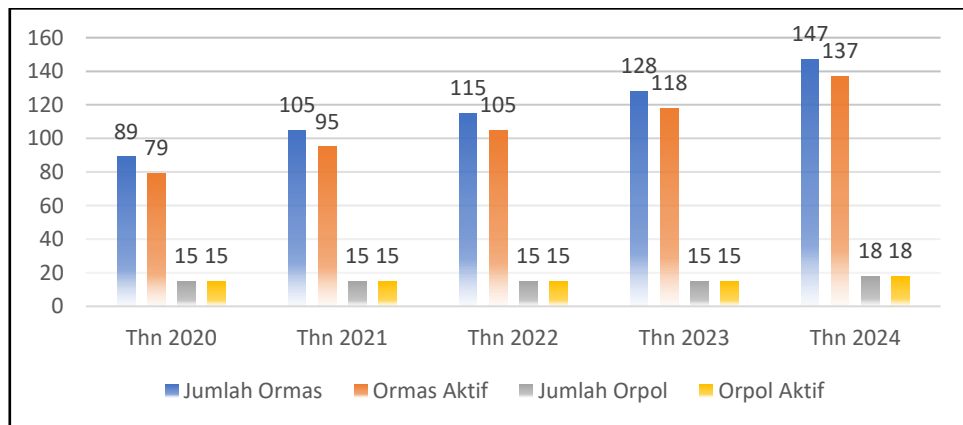
Pada tahun 2020, tercatat 89 ormas dan yang aktif sebanyak 79 (tidak aktif sebanyak 10). Sedangkan organisasi politik dari 15 parpol peserta pemilu 2019 menjadi 18 parpol peserta Pemilu 2024 dan kesemuanya kategori aktif. Pada tahun 2021, jumlah ormas baru yang terdaftar keberadaannya di Pemerintah Kabupaten Sanggau bertambah sebanyak 16 ormas sehingga berjumlah 105 ormas. Selanjutnya pada tahun 2022, bertambah lagi sebanyak 10 ormas, tahun 2023 bertambah sebanyak 13 ormas, tahun 2024 bertambah 16 ormas, sehingga total ormas di akhir tahun 2024 menjadi 147 ormas. Dari jumlah tersebut, tidak ada

penambahan ormas yang tidak aktif (masih tetap 10 ormas). Oleh karena adanya penambahan ormas baru, maka terjadi peningkatan persentase ormas dan orpol yang aktif.

Secara rinci jumlah ormas dan organisasi politik (orpol) di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada grafik 3.9.

Grafik 3.9

JUMLAH ORMAS DAN ORPOL AKTIF



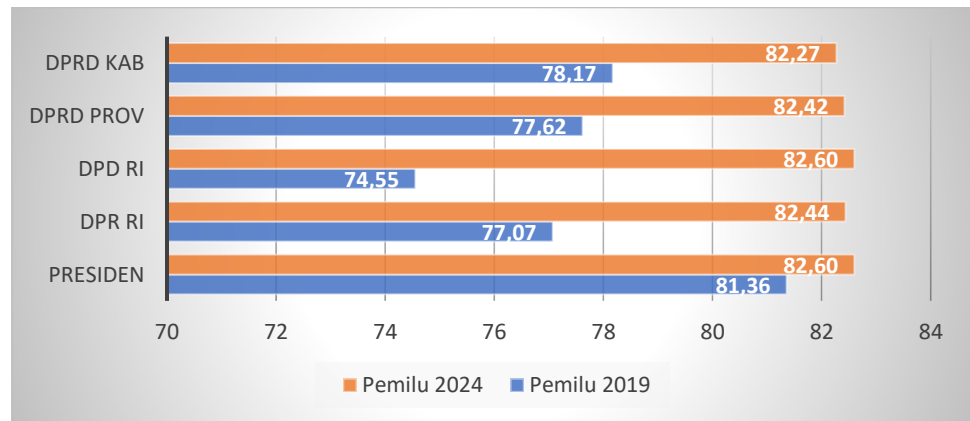
Dalam rangka peningkatan peran ormas dan orpol dalam pembangunan, Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau menerapkan strategi peningkatan kinerja ormas dan partai politik di daerah. Kebijakan yang dilakukan melalui pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan ormas di daerah, serta peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik. Guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan tersebut, pada tahun 2024, dilaksanakan beberapa kegiatan yang memberikan kontribusi cukup berarti terhadap pencapaian meningkatnya peran ormas dan orpol dalam pembangunan, yaitu :

1. Deks Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Desk Pemilu dan Pemilihan Serentak Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan unit kerja (tim kerja) yang khusus dibentuk mengelola dan mengawasi segala terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Sanggau. Tim desk terdiri dari unsur forkopimda, perangkat daerah terkait dan kecamatan. Tujuannya adalah sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Tugasnya adalah untuk mendukung dan melaksanakan pemantauan, menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan terkait pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, dari saat pelaksanaan tahapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, agar bisa berjalan aman, tertib dan lancar.

Hasil dari pelaksanaan tugas Tim Desk diantaranya penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, berjalan aman, tertib dan lancar. Selain itu terjadi kenaikan partisipasi pemilih secara keseluruhan dibandingkan Pemilu tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.10 berikut.

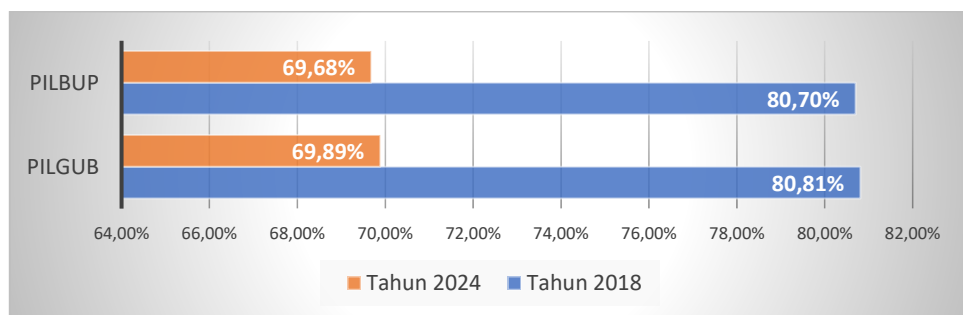
Grafik 3.10
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2019 DAN 2024 (%)



Pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sanggau terjadi kenaikan partisipasi pemilih sebesar 4,10% dibandingkan dengan tahun 2019. Demikian juga pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (4,80%), anggota DPD RI (8,05%), anggota DPR RI (5,37%) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (1,24%).

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 27 November 2024, juga berjalan aman, tertib dan lancar. Namun pada Pilkada tersebut terjadi penurunan partisipasi pemilih. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, partisipasi pemilih turun sebesar 11,02% dibandingkan tahun 2018. Demikian juga pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, partisipasi pemilih turun sebesar 10,92% dibandingkan tahun 2018. Ratar-rata partisipasi pemilihan pada Pilkada tahun 2018 dan 2024, dapat dilihat pada Grafik 3.11 berikut.

Grafik 3.11
PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA 2018 DAN 2024 (%)



2. Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

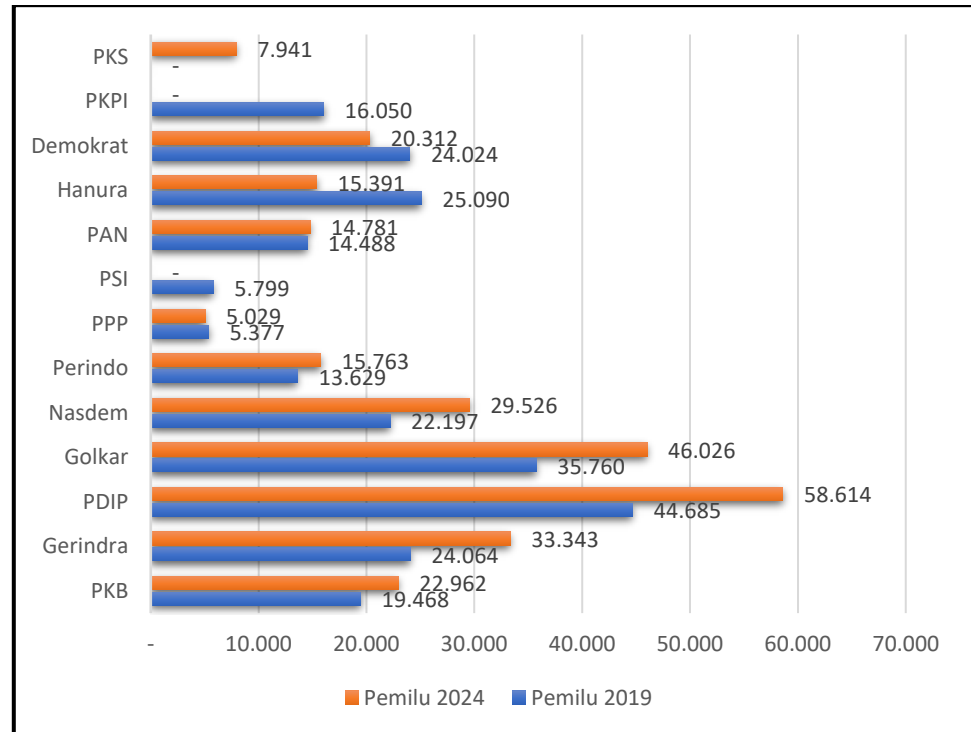
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.043.162.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 9 bulan bagi 12 partai politik yang meraih kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2019 dengan total suara 250.631 dan untuk 3 bulan bagi 11 partai politik yang meraih kursi di DPRD Kabupaten Sanggau hasil Pemilu tahun 2024

dengan total suara 269.688. Setiap satu suara yang diraih partai politik, diberikan bantuan keuangan sebesar Rp8.000,00.

Bantuan keuangan tersebut diberikan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik penerima bantuan. Secara rinci, jumlah suara, jumlah anggota DPRD dan jumlah bantuan keuangan yang diraih atau diterima partai politik dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada grafik 3.12, 3.13 dan 3.14.

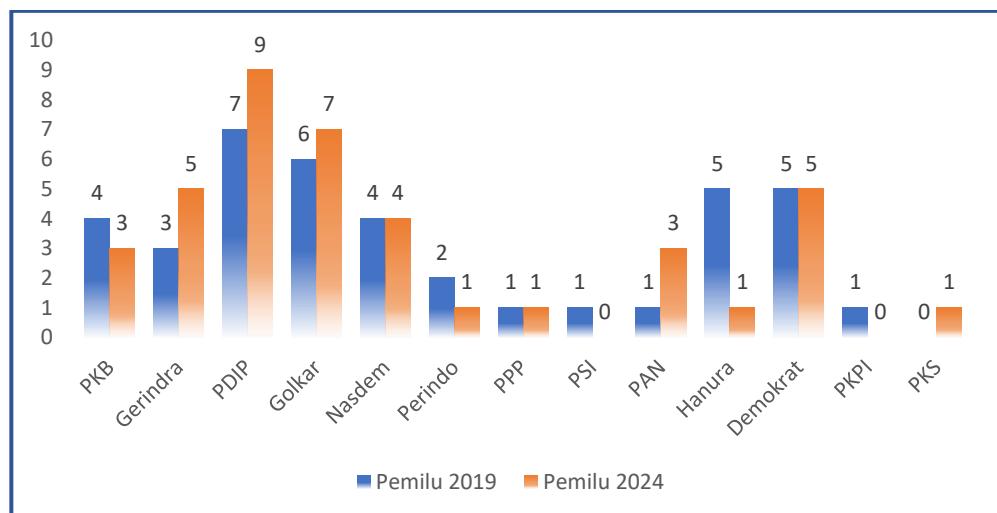
Grafik 3.10

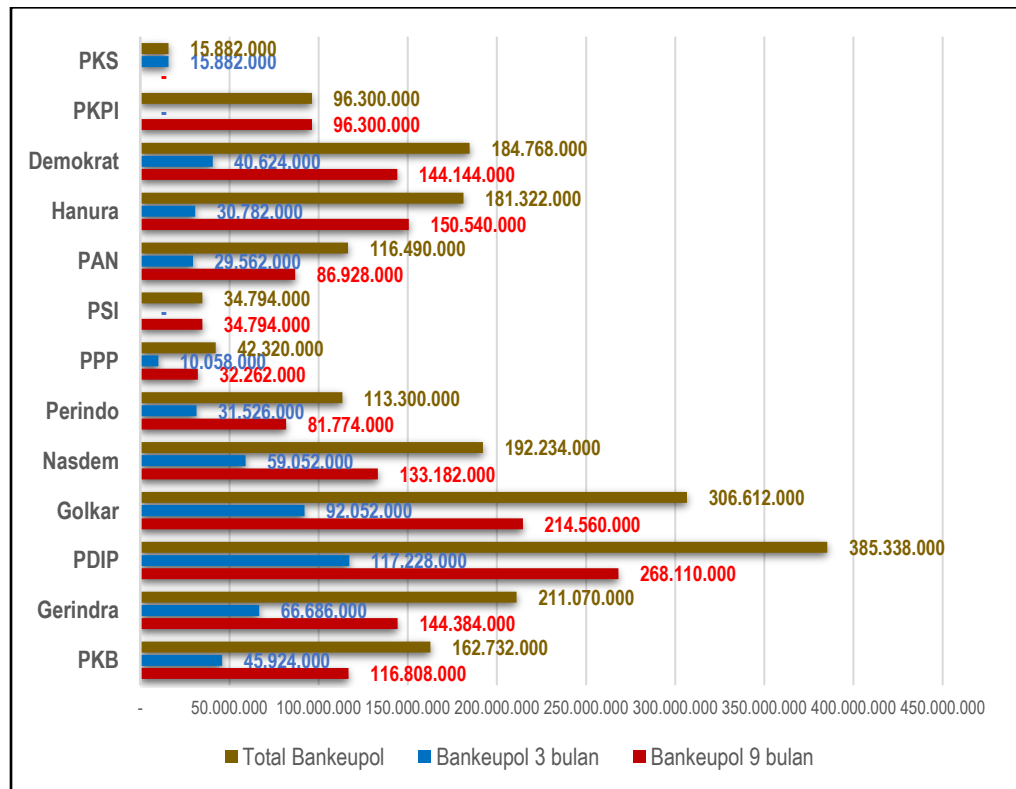
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK



Grafik 3.11

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BERDASARKAN PARTAI POLITIK



Grafik 3.12**JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK****3. Pembinaan Keuangan Bagi Partai Politik**

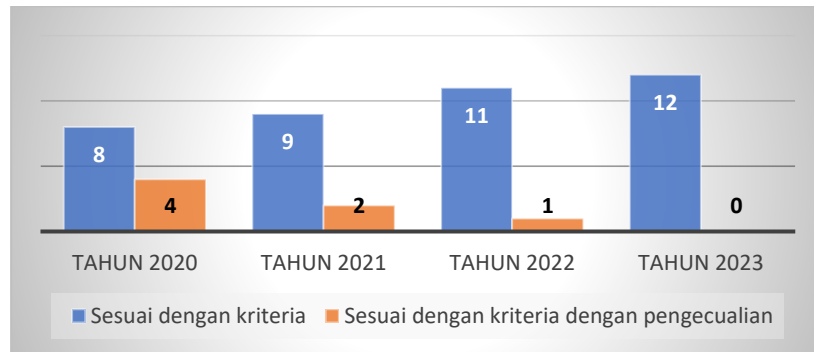
Pembinaan keuangan bagi partai politik dilaksanakan terkait bantuan keuangan partai politik dari pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Pembinaan fokus pada tata cara pertanggungjawaban laporan bantuan keuangan partai politik tahun 2024. Pembinaan dilakukan terhadap 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sanggau (kecuali PKPI dan PSI), bertempat di Hotel Emerald, Sanggau.

Hasil dari kegiatan pembinaan keuangan terhadap partai politik tersebut, setiap awal tahun, partai politik tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangannya kepada pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024, diperoleh bahwa LPj keuangan partai politik atau bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2023, seluruhnya telah “sesuai dengan kriteria” yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan dalam penyajian LPj. Pada tahun-tahun sebelumnya, LPj keuangan partai politik masih ada yang “sesuai dengan kriteria dengan pengecualian”. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.13.



Grafik 3.13

HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LPJ BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2020-2024



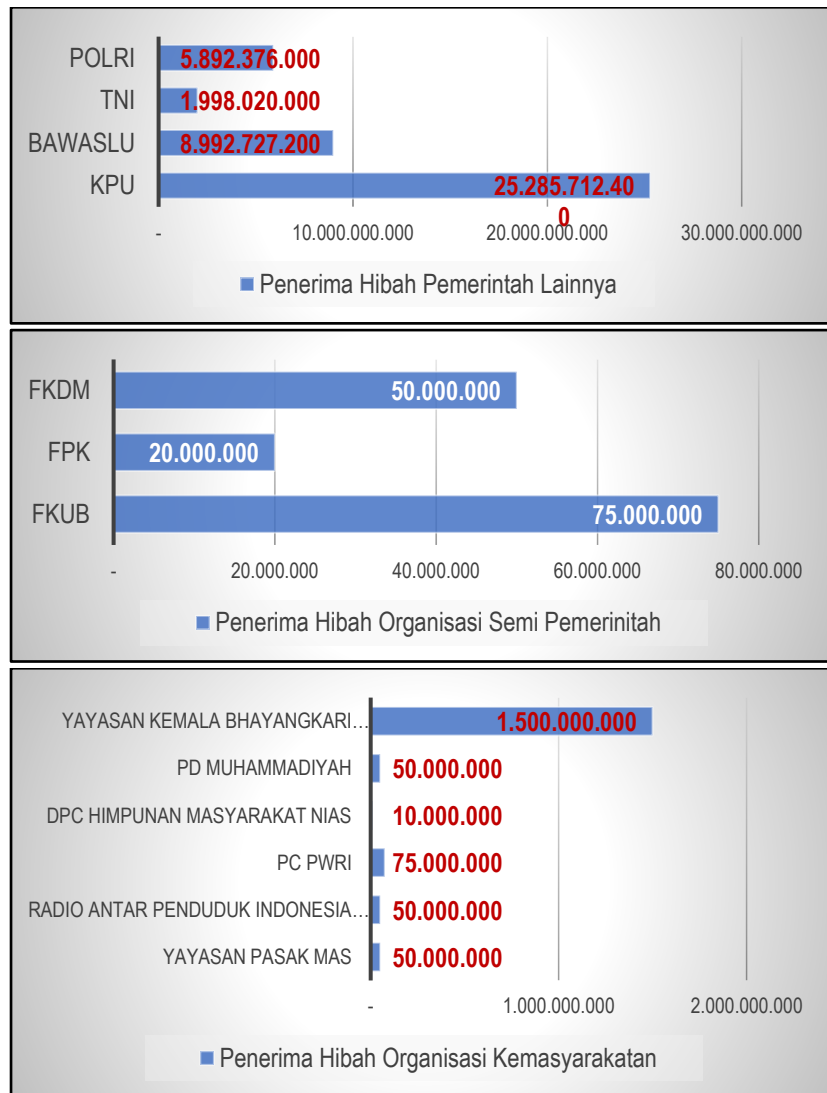
4. Sosialisasi/Penyuluhan dan Pembinaan Keormasan

Sosialisasi dilakukan dengan sasaran pengurus organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, terutama yang masih belum memiliki legalitas atau surat keterangan keberadaan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024, bertempat di Aula Ai Gumis Kantor Kecamatan Sekayam, dengan jumlah ormas yang mengikuti sebanyak 31 ormas. Hasil dari pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan ormas yang belum memiliki legalitas atau surat keterangan keberadaannya dari pemerintah untuk segera mengurus legalitasnya. Disamping itu juga diharapkan ormas-ormas tersebut ikut serta mensukseskan Pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024 dan memberikan manfaat atas keberadaannya di masyarakat.



5. Penyaluran Dana Hibah

Dana hibah diberikan kepada penyelenggara pemilihan (KPU dan Bawaslu) dan kepada pihak keamanan (Polri dan TNI) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selain itu, dana hibah juga diberikan kepada organisasi semi pemerintah dan beberapa organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, dalam rangka dukungan terhadap peran dan kontribusinya pada pembangunan di daerah. Adapun penerima dana hibah tahun 2024, dapat dilihat pada grafik 3.14.

Grafik 3.14**HIBAH TAHUN 2024**

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan” sebagaimana di atas, nilai sangat baik dan optimal. Namun dilihat dari jumlah, keberadaan, dan keaktifan organisasi kemasyaratan di daerah, perlu selalu dimonitor dan dibina sehingga benar-benar memberikan kontribusi yang nyata dan berarti dalam pembangunan daerah. Adapun permasalahan dan solusi ke depan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Masih adanya ormas yang tidak melaporkan aktivitasnya setelah mendapatkan legalitas dari pemerintah;
2. Masih adanya ormas yang belum melengkapi persyaratan dalam memenuhi legalitas sebagai ormas di daerah;
3. Menurunnya partisipasi pemilih dalam waktu yang tidak terlalu lama antara Pemilu dengan Pilkada;

b. Solusi

1. Menyurati ormas untuk membuat laporan aktivitas tahunan ormas dan tembusannya disampaikan kepada pemerintah daerah;
2. Memberikan bantuan hibah kepada ormas yang tata melaporkan aktivitasnya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah;
3. Memberikan pendampingan dan insentif berupa fasilitasi untuk pembuatan akta notaris bagi ormas yang sudah eksis di masyarakat, namun belum memiliki legalitasnya; dan
4. Meningkatkan sosialisasi secara masif terkait pendidikan politik di masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan anggaran perubahan tahun 2024, total anggaran yang dikelola Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau sebesar Rp51.897.984.892. Anggaran tersebut terbagi atas 6 program, dengan besaran anggaran dan besaran realisasi sampai 31 Desember 2024, sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.015.343.595	2.559.607.227	84,89%
2	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.290.466.007	1.235.384.775	95,73%
3	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	210.938.784	203.808.610	96,62%
4	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	338.388.084	320.242.834	94,64%
5	Peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	45.043.174.505	44.798.463.288	99,46%
6	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.999.673.917	1.929.773.714	96,50%
	Jumlah	51.897.984.892	51.047.280.448	98,36%

Secara rata-rata dari 6 program di atas, realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 98,36%. 98,89%. Hal ini menurun dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 98,89%. Realisasi tertinggi ada pada program “Peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik” yaitu 99,46% dan yang terendah pada program “Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota” yaitu sebesar 84,80%.

BAB 4

PENUTUP

Sesuai hasil pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024, secara rata-rata capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau sebesar 99,95%. Capaian tertinggi ada pada sasaran strategis kedua "Meningkatnya penanganan konflik sosial" sebesar 100%, disusul sasaran strategis ketiga "Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan" sebesar 99,94% dan sasaran strategis pertama "Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol", sebesar 99,92%. Penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau terhadap implementasi AKIP Badan Kesbangpol mengalami peningkatan dari predikat "CC" menjadi predikat "B". Dari 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau tahun 2024 "Sangat Tinggi".

Meskipun capaian rata-rata indikator kinerja utama kategori "Sangat Tinggi", namun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik harus terus dilaksanakan dan dikembangkan sehingga menjadi suatu inovasi. Solusi-solusi atau rekomendasi yang diberikan dalam rangka mengatasi permasalahan kinerja, juga harus diperhatikan dan dilaksanakan secara baik.

Secara umum, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Secara terus menerus meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, baik internal di lingkup pemerintah daerah maupun eksternal, dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja utama Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta mengembangkan inovasi dalam pelayanan.
3. Melaksanakan saran/solusi yang diberikan secara konsisten sesuai hasil analisis capaian kinerja utama masing-masing sasaran strategis.

Sanggau, 24 Maret 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,


Antonius, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196511261986031013



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Komodor Yos Sudarso Nomor 60 Sanggau (78512)
 Telepon (0564) 2026001 Fax. (0564) 2026001
 E-mail: kesbangpol@mail.sanggau.go.id Website: kesbangpol@sanggau.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 000.8.2.7/ *011* /BKBP-SET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTONIUS, S.Sos
 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau
 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YOHANES ONTOT
 Jabatan : Pjt. Bupati Sanggau
 selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Mengupayakan dukungan pembiayaan dari APBN atau sumber pembiayaan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang telah dijanjikan.
3. Menyampaikan laporan terkait dengan kinerja disertai data-data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum batas waktu yang ditentukan.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, upaya pembiayaan, dan kepatuhan terhadap pelaporan dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 3 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Pjt. Bupati Sanggau


YOHANES ONTOT

PIHAK KESATU,
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik

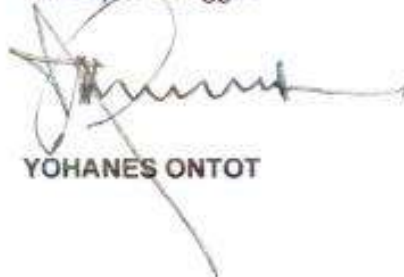

ANTONIUS, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196511261986031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	63
2	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%
3	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam pembangunan	Persentase ormas dan orpol yang aktif	94%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBN/ABPD
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp2.839.320.208	APBD
2.	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Rp1.240.474.407	APBD
3.	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp44.823.690.075	APBD
4.	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp1.999.673.917	APBD
5.	Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp370.238.084	APBD
6.	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp210.938.784	APBD
	Total	Rp51.484.335.475	

Plt. Bupati Sanggau



YOHANES ONTOT

Sanggau, 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik



ANTONIUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196511261986031013